

<b>Ekspektasi Masyarakat</b>	<b>Mandat</b>	<b>Isu Strategis</b>
Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lengkap	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Adanya regulasi untuk penyederhanaan proses pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/ RW/ Desa/ Kelurahan, cukup dengan membawa Kartu Keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	Pemberian identitas penduduk untuk semua usia yaitu KTP-el dan KIA
	Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo	pelayanan terintegrasi 3in1, 5in1 maupun all in one yang mengoptimalkan keterpaduan layanan administrasi kependudukan dan layanan pencatatan sipi
	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan untuk akses pelayanan publik lainnya melalui Perjanjian Kerjasama akses dan pemanfaatan data SIAK
		Pemanfaatan data kependudukan untuk proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan.
		Kebijakan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk mempercepat cakupan akta kelahiran
		Pelayanan akta kelahiran online dengan fasilitasi Ditjen Dukcapil Kemendagri
<b>Rumusan Outcomes</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Levelisasi Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	

<b>Outcomes</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
<b>Indikator Ultimate Outcome</b>	<b>Levelisasi Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
<b>CSF</b>		<b>Indikator Intermediate Outcome</b>
<b>CSF 1</b>	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM
<b>CSF 2</b>	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Sakip
<b>CSF 3</b>	CSF 3	Persentase/Nilai/Angka
<b>CSF 4</b>	CSF 4	Persentase/Nilai/Angka

CSF 1	Kondisi yang diperlukan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya dokumen Administrasi Kependudukan
	Terpenuhinya dokumen Administrasi Pencatatan Sipil
	Terwujudnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang optimal
	Tersedianya data profil administrasi kependudukan
	Kondisi antara 1.5
	Kondisi antara 1.6
	Kondisi antara 1.7

**Nomenklatur Program**

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  
PROGRAM PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN  
Program 5  
Program 6  
Program 7

**Indikator**

**Indikator Intermediate Outcome**

Persentase penduduk yang memiliki KTP-el  
Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran  
Persentase SIAK dalam kondisi baik dan Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan  
Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil  
Indikator 5  
Indikator 6  
Indikator 7

Kondisi Antara CSF 1	Kondisi yang diperlukan
Terpenuhinya dokumen Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Proses pendaftaran penduduk baru
	Kondisi antara 1.1.2
	Kondisi antara 1.1.3
	Kondisi antara 1.1.4
	Kondisi antara 1.1.5
Terpenuhinya dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	Terlaksananya pencatatan dokumen peristiwa penting
	Terlaksananya kegiatan terkait dengan pencatatan peristiwa-peristiwa sipil
	Kondisi antara 1.2.3
	Kondisi antara 1.2.4
	Kondisi antara 1.2.5
Terwujudnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang optimal	Teridentifikasinya jenis data kependudukan yang dibutuhkan
	Terintegrasinya database administratif terkait penduduk
	Terintegrasinya organisasi perangkat daerah
	Kondisi antara 1.3.4
	Kondisi antara 1.3.5
Tersedianya data profil administrasi kependudukan	Tersedianya penyajian data agregat kependudukan
	Kondisi antara 1.4.2
	Kondisi antara 1.4.3
	Kondisi antara 1.4.4
	Kondisi antara 1.4.5
Kondisi antara 1.5	Kondisi antara 1.5.1
	Kondisi antara 1.5.2
	Kondisi antara 1.5.3
	Kondisi antara 1.5.4
	Kondisi antara 1.5.5
Kondisi antara 1.6	Kondisi antara 1.6.1
	Kondisi antara 1.6.2
	Kondisi antara 1.6.3
	Kondisi antara 1.6.4
	Kondisi antara 1.6.5
Kondisi antara 1.7	Kondisi antara 1.7.1
	Kondisi antara 1.7.2
	Kondisi antara 1.7.3
	Kondisi antara 1.7.4
	Kondisi antara 1.7.5

**Kegiatan**

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
Kegiatan 1  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
Kegiatan 1  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
Kegiatan 1  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
Kegiatan 1  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5  
Kegiatan 1  
Kegiatan 2  
Kegiatan 3  
Kegiatan 4  
Kegiatan 5

**Indikator Immediate Outcome**

Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan  
Indikator 2  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan  
Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Persentase laporan dan penyajian data yang tepat waktu  
Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan  
Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Bimtek tersampaikan  
Indikator 4  
Indikator 5  
Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Indikator 2  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Indikator 1  
Indikator 2  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Indikator 1  
Indikator 2  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Indikator 1  
Indikator 2  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5

Terpenuhinya dokumen Administrasi Kependudukan	Kondisi yang diperlukan
Terlaksananya Proses pendaftaran penduduk baru	Terdatanya Identitas kependudukan bagi WNA dan Penduduk Rentan
	Terbitnya Kepemilikan Identitas Kependudukan
	Terbitnya Dokumen Administrasi Pindah Datang
	Kondisi operasional 1.1.1.4
	Kondisi operasional 1.1.1.5
Kondisi antara 1.1.2	Kondisi operasional 1.1.2.1
	Kondisi operasional 1.1.2.2
	Kondisi operasional 1.1.2.3
	Kondisi operasional 1.1.2.4
	Kondisi operasional 1.1.2.5
Kondisi antara 1.1.3	Kondisi operasional 1.1.3.1
	Kondisi operasional 1.1.3.2
	Kondisi operasional 1.1.3.3
	Kondisi operasional 1.1.3.4
	Kondisi operasional 1.1.3.5
Kondisi antara 1.1.4	Kondisi operasional 1.1.4.1
	Kondisi operasional 1.1.4.2
	Kondisi operasional 1.1.4.3
	Kondisi operasional 1.1.4.4
	Kondisi operasional 1.1.4.5
Kondisi antara 1.1.5	Kondisi operasional 1.1.5.1
	Kondisi operasional 1.1.5.2
	Kondisi operasional 1.1.5.3
	Kondisi operasional 1.1.5.4
	Kondisi operasional 1.1.5.5

**Sub Kegiatan**

PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK  
PENCATATAN PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN  
Sub Kegiatan 4  
Sub Kegiatan 5  
Sub Kegiatan 6  
Sub Kegiatan 7  
Sub Kegiatan 8  
Sub Kegiatan 9  
Sub Kegiatan 10  
Sub Kegiatan 11  
Sub Kegiatan 12  
Sub Kegiatan 13  
Sub Kegiatan 14  
Sub Kegiatan 15  
Sub Kegiatan 16  
Sub Kegiatan 17  
Sub Kegiatan 18  
Sub Kegiatan 19  
Sub Kegiatan 20  
Sub Kegiatan 21  
Sub Kegiatan 22  
Sub Kegiatan 23  
Sub Kegiatan 24  
Sub Kegiatan 25

**Indikator Output**

Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan  
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk  
Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  
Indikator 4  
Indikator 5  
Indikator 6  
Indikator 7  
Indikator 8  
Indikator 9  
Indikator 10  
Indikator 11  
Indikator 12  
Indikator 13  
Indikator 14  
Indikator 15  
Indikator 16  
Indikator 17  
Indikator 18  
Indikator 19  
Indikator 20  
Indikator 21  
Indikator 22  
Indikator 23  
Indikator 24  
Indikator 25

Terpenuhinya dokumen Administrasi Pencatatan Sipil	Kondisi yang diperlukan
Terlaksananya pencatatan dokumen peristiwa penting	Terbitnya dokumen administrasi Pencatatan Sipil Terkait Perkawinan, Perceraian, Kematian
	Terbitnya dokumen administrasi Pencatatan Sipil Terkait Kelahiran
	Kondisi operasional 1.2.1.3
	Kondisi operasional 1.2.1.4
	Kondisi operasional 1.2.1.5
Terlaksananya kegiatan terkait dengan pencatatan peristiwa-peristiwa sipil	Terlaksananya penerbitan dokumen administrasi Pencatatan Sipil melalui kegiatan Pelayanan Keliling
	Kondisi operasional 1.2.2.2
	Kondisi operasional 1.2.2.3
	Kondisi operasional 1.2.2.4
	Kondisi operasional 1.2.2.5
Kondisi antara 1.2.3	Kondisi operasional 1.2.3.1
	Kondisi operasional 1.2.3.2
	Kondisi operasional 1.2.3.3
	Kondisi operasional 1.2.3.4
	Kondisi operasional 1.2.3.5
Kondisi antara 1.2.4	Kondisi operasional 1.2.4.1
	Kondisi operasional 1.2.4.2
	Kondisi operasional 1.2.4.3

**Sub Kegiatan**

PENCATATAN PENATAUSAHAAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING  
PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
Sub Kegiatan 3  
Sub Kegiatan 4  
Sub Kegiatan 5  
Sub Kegiatan 7  
Sub Kegiatan 8  
Sub Kegiatan 9  
Sub Kegiatan 10  
Sub Kegiatan 11  
Sub Kegiatan 12  
Sub Kegiatan 13  
Sub Kegiatan 14  
Sub Kegiatan 15  
Sub Kegiatan 16  
Sub Kegiatan 17  
Sub Kegiatan 18

**Indikator Output**

Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting  
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil  
Indikator 7  
Indikator 8  
Indikator 9  
Indikator 10  
Indikator 11  
Indikator 12  
Indikator 13  
Indikator 14  
Indikator 15  
Indikator 16  
Indikator 17  
Indikator 18

Kondisi antara 1.2.5	Kondisi operasional 1.2.4.4
	Kondisi operasional 1.2.4.5
	Kondisi operasional 1.2.5.1
	Kondisi operasional 1.2.5.2
	Kondisi operasional 1.2.5.3
	Kondisi operasional 1.2.5.4
Kondisi operasional 1.2.5.5	

Sub Kegiatan 19  
Sub Kegiatan 20  
Sub Kegiatan 21  
Sub Kegiatan 22  
Sub Kegiatan 23  
Sub Kegiatan 24  
Sub Kegiatan 25

Indikator 19  
Indikator 20  
Indikator 21  
Indikator 22  
Indikator 23  
Indikator 24  
Indikator 25

Terwujudnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang optimal	Kondisi yang diperlukan
Teridentifikasinya jenis data kependudukan yang dibutuhkan	Terpenuhinya Data kependudukan yang dapat disajikan
	Terpenuhinya Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data
	Kondisi operasional 1.3.1.3
	Kondisi operasional 1.3.1.4
Terintegrasinya database administratif terkait penduduk	Kondisi operasional 1.3.1.5
	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang valid dan akurat
	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kondisi operasional 1.3.2.3
Terintegritasnya organisasi perangkat daerah	Kondisi operasional 1.3.2.4
	Kondisi operasional 1.3.2.5
	Terlaksananya Bimtek bagi operator SIAK
	Kondisi operasional 1.3.3.2
Kondisi antara 1.3.4	Kondisi operasional 1.3.3.3
	Kondisi operasional 1.3.3.4
	Kondisi operasional 1.3.3.5
	Kondisi operasional 1.3.4.1
	Kondisi operasional 1.3.4.2
Kondisi antara 1.3.5	Kondisi operasional 1.3.4.3
	Kondisi operasional 1.3.4.4
	Kondisi operasional 1.3.4.5
	Kondisi operasional 1.3.5.1
	Kondisi operasional 1.3.5.2
	Kondisi operasional 1.3.5.3
	Kondisi operasional 1.3.5.4
	Kondisi operasional 1.3.5.5

**Sub Kegiatan**

PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN  
KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
Sub Kegiatan 3  
Sub Kegiatan 4  
Sub Kegiatan 5  
FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
Sub Kegiatan 8  
Sub Kegiatan 9  
Sub Kegiatan 10  
BIMBINGAN TEKNIS TERAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN  
Sub Kegiatan 12  
Sub Kegiatan 13  
Sub Kegiatan 14  
Sub Kegiatan 15  
Sub Kegiatan 16  
Sub Kegiatan 17  
Sub Kegiatan 18  
Sub Kegiatan 19  
Sub Kegiatan 20  
Sub Kegiatan 21  
Sub Kegiatan 22  
Sub Kegiatan 23  
Sub Kegiatan 24  
Sub Kegiatan 25

**Indikator Output**

Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan  
Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Indikator 8  
Indikator 9  
Indikator 10  
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data  
Indikator 12  
Indikator 13  
Indikator 14  
Indikator 15  
Indikator 16  
Indikator 17  
Indikator 18  
Indikator 19  
Indikator 20  
Indikator 21  
Indikator 22  
Indikator 23  
Indikator 24  
Indikator 25

Tersedianya data profil administrasi kependudukan	Kondisi yang diperlukan
Tersedianya penyajian data agregat kependudukan	Tersedianya informasi demografis, sosial, ekonomi, dan lainnya tentang penduduk
	Kondisi operasional 1.4.1.2
	Kondisi operasional 1.4.1.3
	Kondisi operasional 1.4.1.4
	Kondisi operasional 1.4.1.5
Kondisi antara 1.4.2	Kondisi operasional 1.4.2.1
	Kondisi operasional 1.4.2.2
	Kondisi operasional 1.4.2.3
	Kondisi operasional 1.4.2.4
	Kondisi operasional 1.4.2.5
Kondisi antara 1.4.3	Kondisi operasional 1.4.3.1
	Kondisi operasional 1.4.3.2
	Kondisi operasional 1.4.3.3
	Kondisi operasional 1.4.3.4
	Kondisi operasional 1.4.3.5
Kondisi antara 1.4.4	Kondisi operasional 1.4.4.1
	Kondisi operasional 1.4.4.2
	Kondisi operasional 1.4.4.3
	Kondisi operasional 1.4.4.4
	Kondisi operasional 1.4.4.5
Kondisi antara 1.4.5	Kondisi operasional 1.4.5.1
	Kondisi operasional 1.4.5.2
	Kondisi operasional 1.4.5.3
	Kondisi operasional 1.4.5.4
	Kondisi operasional 1.4.5.5

**Sub Kegiatan**

PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA  
Sub Kegiatan 2  
Sub Kegiatan 3  
Sub Kegiatan 4  
Sub Kegiatan 5  
Sub Kegiatan 6  
Sub Kegiatan 7  
Sub Kegiatan 8  
Sub Kegiatan 9  
Sub Kegiatan 10  
Sub Kegiatan 11  
Sub Kegiatan 12  
Sub Kegiatan 13  
Sub Kegiatan 14  
Sub Kegiatan 15  
Sub Kegiatan 16  
Sub Kegiatan 17  
Sub Kegiatan 18  
Sub Kegiatan 19  
Sub Kegiatan 20  
Sub Kegiatan 21  
Sub Kegiatan 22  
Sub Kegiatan 23  
Sub Kegiatan 24  
Sub Kegiatan 25

**Indikator Output**

Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Indikator 2  
Indikator 3  
Indikator 4  
Indikator 5  
Indikator 6  
Indikator 7  
Indikator 8  
Indikator 9  
Indikator 10  
Indikator 11  
Indikator 12  
Indikator 13  
Indikator 14  
Indikator 15  
Indikator 16  
Indikator 17  
Indikator 18  
Indikator 19  
Indikator 20  
Indikator 21  
Indikator 22  
Indikator 23  
Indikator 24  
Indikator 25

CSF 2	Kondisi yang diperlukan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Internal	Terlaksananya kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota
	Kondisi antara 2.2
	Kondisi antara 2.3
	Kondisi antara 2.4
	Kondisi antara 2.5
	Kondisi antara 2.6
	Kondisi antara 2.7

Nomenklatur Program	Indikator
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%
Program 2	Indikator 2
Program 3	Indikator 3
Program 4	Indikator 4
Program 5	Indikator 5
Program 6	Indikator 6
Program 7	Indikator 7

Kondisi Antara CSF 2	Kondisi yang diperlukan	
Terlaksananya kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota	Terlaksananya penyusunan program/perencanaan keuangan secara efektif dan efisien	
	Terlaksananya pengelolaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah	
	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan aset fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah	
	Tersusunnya laporan manajemen sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah	
	Tercukupinya kebutuhan manajemen dan operasional rutin dalam pemerintahan daerah	
	Terperuhnya pengadaan barang yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	
	Terperuhnya kebutuhan jasa yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	
	Terlaksananya perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan aset fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	
	Kondisi antara 2.2.1	
	Kondisi antara 2.2.2	
Kondisi antara 2.2	Kondisi antara 2.2.3	
	Kondisi antara 2.2.4	
	Kondisi antara 2.2.5	
	Kondisi antara 2.3	Kondisi antara 2.3.1
		Kondisi antara 2.3.2
Kondisi antara 2.3.3		
Kondisi antara 2.3.4		
Kondisi antara 2.3.5		
Kondisi antara 2.4	Kondisi antara 2.4.1	
	Kondisi antara 2.4.2	
	Kondisi antara 2.4.3	
	Kondisi antara 2.4.4	
	Kondisi antara 2.4.5	
Kondisi antara 2.5	Kondisi antara 2.5.1	
	Kondisi antara 2.5.2	
	Kondisi antara 2.5.3	
	Kondisi antara 2.5.4	
	Kondisi antara 2.5.5	
Kondisi antara 2.6	Kondisi antara 2.6.1	
	Kondisi antara 2.6.2	
	Kondisi antara 2.6.3	
	Kondisi antara 2.6.4	
	Kondisi antara 2.6.5	
Kondisi antara 2.7	Kondisi antara 2.7.1	
	Kondisi antara 2.7.2	
	Kondisi antara 2.7.3	
	Kondisi antara 2.7.4	
	Kondisi antara 2.7.5	

Kegiatan	Indikator Immediate Outcome
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara
Kegiatan 1	Indikator 1
Kegiatan 2	Indikator 2
Kegiatan 3	Indikator 3
Kegiatan 4	Indikator 4
Kegiatan 5	Indikator 5
Kegiatan 1	Indikator 1
Kegiatan 2	Indikator 2
Kegiatan 3	Indikator 3
Kegiatan 4	Indikator 4
Kegiatan 5	Indikator 5
Kegiatan 1	Indikator 1
Kegiatan 2	Indikator 2
Kegiatan 3	Indikator 3
Kegiatan 4	Indikator 4
Kegiatan 5	Indikator 5
Kegiatan 1	Indikator 1
Kegiatan 2	Indikator 2
Kegiatan 3	Indikator 3
Kegiatan 4	Indikator 4
Kegiatan 5	Indikator 5
Kegiatan 1	Indikator 1
Kegiatan 2	Indikator 2
Kegiatan 3	Indikator 3
Kegiatan 4	Indikator 4
Kegiatan 5	Indikator 5
Kegiatan 1	Indikator 1
Kegiatan 2	Indikator 2
Kegiatan 3	Indikator 3
Kegiatan 4	Indikator 4
Kegiatan 5	Indikator 5

Terlaksananya kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota	Kondisi yang diperlukan
Terlaksananya penyusunan program/perencanaan keuangan secara efektif dan efisien	Tersusunnya dokumen perencanaan PD
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kondisi operasional 2.1.1.3
	Kondisi operasional 2.1.1.4
	Kondisi operasional 2.1.1.5
Terlaksananya pengelolaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah	Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN
	Terlaksananya pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
	Tersusunnya Laporan Keuangan PD
	Kondisi operasional 2.1.2.4
	Kondisi operasional 2.1.2.5
Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan aset fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Kondisi operasional 2.1.3.2
	Kondisi operasional 2.1.3.3
	Kondisi operasional 2.1.3.4
	Kondisi operasional 2.1.3.5

Sub Kegiatan	Indikator Output
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan 3	Indikator 3
Sub Kegiatan 4	Indikator 4
Sub Kegiatan 5	Indikator 5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sub Kegiatan 9	Indikator 9
Sub Kegiatan 10	Indikator 10
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sub Kegiatan 12	Indikator 12
Sub Kegiatan 13	Indikator 13
Sub Kegiatan 14	Indikator 14
Sub Kegiatan 15	Indikator 15

Tersusunnya laporan manajemen sumber daya manusia dalam pemerintahan daerah	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian PD	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Kondisi operasional 2.1.4.2	Sub Kegiatan 17	Indikator 17
	Kondisi operasional 2.1.4.3	Sub Kegiatan 18	Indikator 18
	Kondisi operasional 2.1.4.4	Sub Kegiatan 19	Indikator 19
Tercukupinya kebutuhan manajemen dan operasional rutin dalam pemerintahan daerah	Kondisi operasional 2.1.4.5	Sub Kegiatan 20	Indikator 20
	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Terpenuhinya kebutuhan Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Terpenuhinya kebutuhan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
Terpenuhinya pengadaan barang yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Terpenuhinya pengadaan barang yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Kondisi operasional 2.1.3.4	Sub Kegiatan 30	Indikator 30
	Kondisi operasional 2.1.3.5	Sub Kegiatan 31	Indikator 31
	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya kebutuhan jasa yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	Tersusunnya dokumen laporan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Kondisi operasional 2.1.4.3	Sub Kegiatan 34	Indikator 34
	Kondisi operasional 2.1.4.4	Sub Kegiatan 35	Indikator 35
	Kondisi operasional 2.1.4.5	Sub Kegiatan 36	Indikator 36
Terlaksananya perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan aset fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahannya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Kondisi operasional 2.1.5.3	Sub Kegiatan 39	Indikator 39
	Kondisi operasional 2.1.5.4	Sub Kegiatan 40	Indikator 40
	Kondisi operasional 2.1.5.5	Sub Kegiatan 41	Indikator 41



